



STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN

www.esaunggul.ac.id

SESI-04

**Erlina Puspitaloka Mahadewi, SE, MM, MBL
Prodi Kesmas, FIKES Univ. Esa Unggul**

STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN

Universitas Esa Unggul 2018

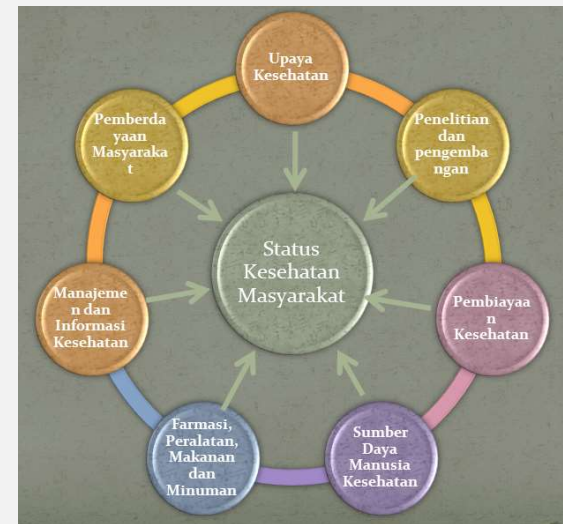
**Dosen Pengampu :
Erlina Puspitaloka Mahadewi, SE, MM, MBL**

UPAYA MENCAPAI SPM BIDANG KESEHATAN

LINGKUNGAN POLITIK, HUKUM, EKONOMI,
SOSIAL, AGAMA, BUDAYA, FISIK, BIOLOGI,
ILMU DAN TEKNOLOGI

INDONESIA
SEHAT

SPM



**PERPRES 72/2012 SKN; PMK 36/2016 PDKT KELUARGA; PMK 46/2016 SPM KES*

SISTEMATIKAN PEMAPARAN

- SPM dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- SPM Bidang Kesehatan
- Implementasi dan Upaya pencapaian SPM
- Monev SPM
- Kesimpulan

PERAN PUSAT

❑ PENYIAPAN KEBIJAKAN/ PEDOMAN

❑ Mendukung peningkatan sarana dan prasarana melalui :
Sarana Fisik dan Obat melalui → DAK Fisik
Operasional dilapangan → DAK Non Fisik (BOK)

❑ Memenuhi kebutuhan dokter spesialis SDM (UU No. 23 → lampiran)
❑ Membantu peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui Dana Dekon

❑ Meningkatkan peran lintas sektor

❑ Koordinasi & Bimbingan: RAKERKESNAS, BINWIL TERPADU, DLL

Sistem Pemerintahan Pusat

PRESIDEN
DAN
WAKIL
PRESIDEN

PARA
MENTERI
KOORDINATOR

PARA
MENTERI

Menteri

Organisasi Pemerintah Pusat

PERAN KAB/KOTA

- ❑ PENYIAPAN PERATURAN DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN SPM DIWILAYAHNYA
- ❑ MEMENUHI ANGGARAN YANG DIBUTUHKAN
- ❑ MELAKSANAKAN SPM YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA
- ❑ MEMENUHI KEBUTUHAN DAN DISTRIBUSI SDM DIWILAYAHNYA
- ❑ MENYIAPKAN SARANA DAN PRASARANA YANG DIBUTUHKAN
- ❑ MELAKSANAKAN PENDEKATAN KELUARGA DAN INTEGRASI KEGIATAN
- ❑ MELAKUKAN MONEV DAN PEMBINAAN DI DI WILAYAHNYA
- ❑ KOORDINASI LINTAS SEKTOR

PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT





4

MONEV SPM

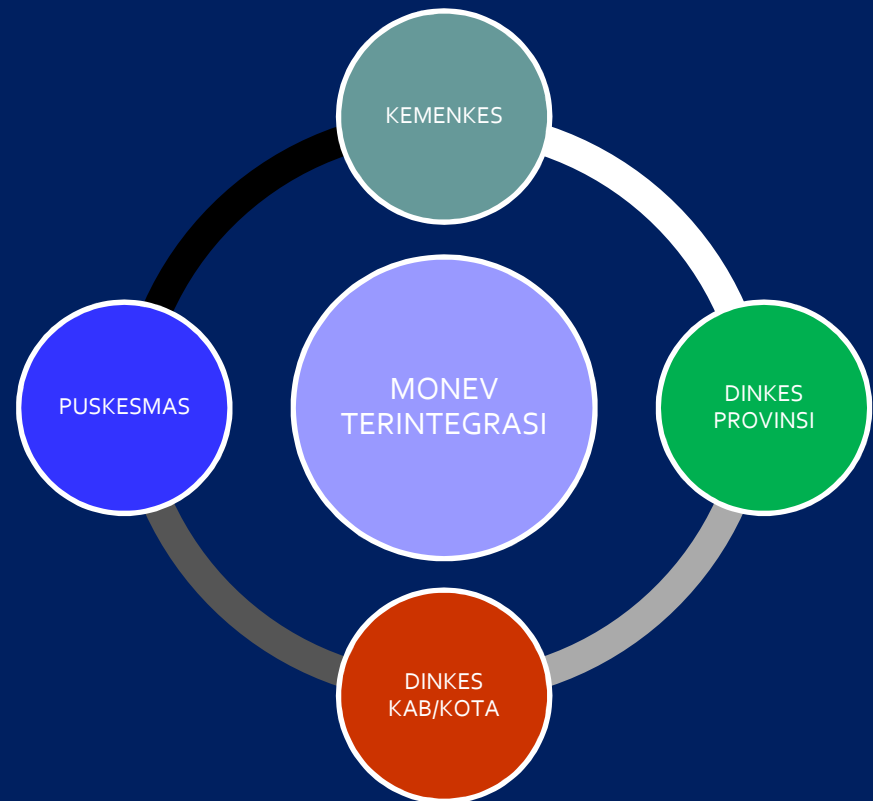
MONEV TERINTEGRASI PUSAT DAN DAERAH

Monev terhadap keseluruhan tahapan kegiatan pelaksanaan mulai dari tahap persiapan, pelatihan, pendataan, analisis, intervensi sampai maintenance

Pengembangan Sistem Pelaporan dan data lainnya → intervensi terpadu → Perencanaan mendatang

Melakukan pemetaan wilayah berdasarkan hasil evaluasi

Monev dalam bentuk penelitian harus dilakukan



HASIL EVALUASI SPM

Jika setelah Evaluasi ternyata SPM tidak tercapai :

- ❑ Kepala daerah dan/atau wakil kepala Daerah dikenai **sanksi administratif berupa teguran tertulis** oleh Menteri untuk Gubernur dan/atau wakil Gubernur serta oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Walikota
- ❑ Dalam hal **teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan**, Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah **diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan**
- ❑ Dalam hal Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah telah selesai menjalani pemberhentian sementara, **tetap tidak melaksanakan program strategis nasional** (termasuk SPM) yang bersangkutan **diberhentikan** sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah



5

KESIMPULAN

KESIMPULAN

1. SPM yang telah ditetapkan pemerintah menjadi salah satu **acuan** bagi pemerintah daerah **untuk menyusun perencanaan dan penganggaran** penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Rencana pencapaian SPM tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (**RPJMD**) dan Rencana Strategis Daerah (**Renstrada**)
3. **Target tahunan** pencapaian SPM dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (**RKPD**), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (**Renja SKPD**), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
4. Pemerintah daerah mengakomodir pengelolaan data dan informasi penerapan **SPM kedalam Sistem Informasi Daerah (Pengumpulan data)**.

Lanjutan

5. Mengingat SPM adalah penyediaan kebutuhan dasar secara minimal bagi warga negara, maka seluruh warga negara penerima harus memperolehnya (100 %).
6. Dalam hal ketersediaan layanan tersebut senyatanya belum mencapai 100 %, maka hal tersebut dapat dimaklumi mengingat untuk memproduksi layanan memerlukan waktu. Namun dalam evaluasi SPM tetap dinyatakan daerah tersebut “belum memenuhi SPM”.
7. penganggaran pemenuhan SPM tidak boleh dibatasi oleh anggaran (unconstrain budget).
8. Penganggaran SPM harus diprioritaskan, dengan demikian maka anggaran SPM harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum memenuhi anggaran lainnya.
9. Untuk memudahkan pencapaian SPM, maka pelaksanaan pendekatan keluarga dan Germas menjadi faktor penentu
10. SPM akan dievaluasi dan menjadi indikator kinerja penting dari Kepala Daerah

TERIMA KASIH